

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
3 DESA KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Junior Trimunanda
NIM : 222014099**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
3 DESA KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Junior Trimunanda
NIM : 222014099**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junior Trimunanda

NIM : 222014099

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsikuensinya.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan



Junior Trimunanda

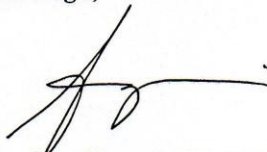
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 3 Desa Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nama : Junior Trimunanda
Nim : 222014099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

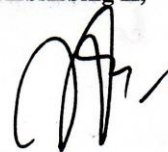
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,



Hj. Rosalina Ghozali, S.E.,M.Si.,Ak
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

Pembimbing II,



Hj. Ida Zuraidah, S.E.,M.Si.,Ak
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betrij, S.E.,Ak.,M.Si.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Abstrak

Junior Trimunanda/222014099/2019/Analisis Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 3 Desa Keccamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerling Ilir

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu bagaimanakah Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 3 Desa Keccamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerling Ilir dan Tujuannya adalah untuk mengetahui Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada 3 Desa di Keccamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada 3 di kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir. Variabel dalam penelitian ini adalah Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yaitu mayoritas berpendidikan SD,SMP dan banyak juga yang tidak sekolah, sehingga menyebabkan daya kritis masyarakat rendah dan cenderung tidak peduli dan tidak mau berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, terbatasnya anggaran musyawarah, peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ADD kurang mengakomodir partisipasi masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang hanya dilaksanakan latau 2 kali saja sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui peran penting mereka dalam pengelolaan ADD dan menyebabkan masyarakat tidak mau terlibat dalam pengeloaal ADD.

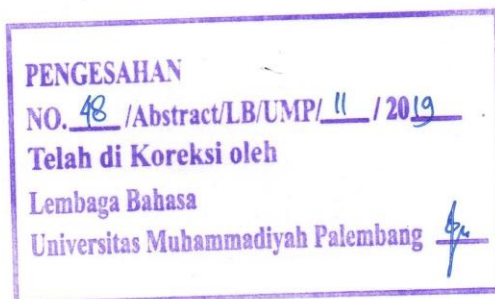
Kata Kunci : Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Abstract

Junior Trimunanda/222014099/2019/An Analysis of the Inhibiting Factors of Community Participation in Management of Village Fund Allocation (ADD) in 3 Villages in Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

This research was conducted to answer the existing problems, namely how to inhibit community participation in the management of Village Fund Allocation (ADD) in 3 villages in Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir and the aim was to determine the inhibiting factors of community participation in village fund allocation 3 villages in Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. This type of research was descriptive research. This research was conducted in 3 kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir. The variables in this study were the Inhibiting Factors of Community Participation in Village Fund Allocation Management (ADD). The data used primary and secondary data. Techniques for collecting data used interviews, observation and document analysis. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the study showed that the inhibiting factors of community participation in the management of village fund allocation (ADD) were due to the low level of education of the community, the majority of elementary, junior high school and many who did not attend school, causing low critical power and unwillingness participating in ADD management, the limited budget for deliberation, government regulations and policies in ADD management did not accommodate community participation and lack of socialization on the importance of community participation in ADD management which was only implemented 1 or 2 times, causing many people not to know their important role in managing ADD and caused the community did not want to be involved in the management of ADD.

Keywords: Inhibiting Factors of Community Participation, Management of Village Fund Allocation.



PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar Lagi Melihat atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 3 Desa Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir**”. Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dalam pembahasan, analisis, materi pendukung, dan penelaahan materi ataupun teknik penyusunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yaitu (Bapak Makmun dan Ibu Rusna) tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Hj. Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.Si

yang telah membimbing, memberikan pengarahannya dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tidak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E, Ak.,M.Si.CA dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Rosalina Ghozali, S.E.,Ak.,M.Si dan Ibu Hj. Ida Zuraidah, S.E.,Ak.,M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan serta memberikan saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anggrelia Afrida, S.E., M.Si selaku pembimbing Akademik saya yang memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala desa beserta perangkat dan masyarakat desa lingkis, desa muara batun dan desa tanjung aur.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan dan teman-teman paket 13 serta teman-teman KKN posko 105 yang telah memberikan do'a serta dukungan.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2019

Penulis

Junior Trimunanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	12
a. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan ADD.....	13
b. Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat	14
c. Faktor pendukung Partisipasi Masyarakat	15
2. Alokasi Dana Desa	16
a. Pengertian Alokasi Dana Desa	16
b. Dasar hukum tentang Alokasi Dana Desa	16

c. Tujuan Alokasi Dana Desa	18
d. Sasaran Alokasi Dana Desa	19
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	19
4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa	20
5. Penggunaan Alokasi Dana Desa	21
6. Sanksi	21
B. Penelitian Sebelumnya	22

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data Yang Diperlukan.....	29
E. Tehnik Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Desa Lingkis Kecamatan Jejawi	33
2. Visi-Misi Desa Lingkis Kecamatan Jejawi	34
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lingkis.....	36
4. Gambaran Umum Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi	37
5. Visi-Misi Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi.....	37
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Batun	39
7. Gambaran Umum Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi.....	40
8. Visi-Misi Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi	40
9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Aur	42
10. Tugas Pokok dan Fungsi.....	43
11. Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1 . Alokasi dana desa	58

2 . Faktor penghambat partisipasi masyarakat	60
1.Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah	60
2.Terbatasnya anggaran penyelenggaraan musyawarah	62
3. Peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ADD kurang mengakomodir partisipasi masyarakat	64
4. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan ADD.	64

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut peraturan Menteri No 113 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. ADD yang diberikan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan ruang yang besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa

dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa, karena masih kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat desa.

Keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan alokasi dana desa tidak saja dipengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintah beserta perangkat desa namun tak kalah pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pendukung kegiatan baik fisik maupun nonfisik. Ditempuh upaya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa upaya antara lain dengan memberikan bantuan dana sebagai stimulan atau penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan teknis melalui petugas lapangan agar masyarakat mampu sebagai subjek dari pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi Menurut Mardiasmo (2009: 18) adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi Masyarakat Menurut V. Wiratna (2015: 36) adalah kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat

pedesaan. Aparat desa memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa agar dana desa dapat digunakan secara efektif. Namun selain aparat desa, partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan ADD guna membangun desa. Kegagalan berbagai program pembangunan desa di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Diperlukan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak baik pemerintah daerah maupun dari pihak masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut sehingga alokasi dana desa dapat terealisasi dengan cepat.

Menurut Mardiasmo (2009: 18) salah satu karakteristik *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya, UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *Good Governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Alokasi Dana Desa menurut permendagri No 113 tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pada masa orde baru secara substansional pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam atau penyeragaman oleh pemerintah pusat, program pembangunan desa lebih cenderung *top-down* pada era reformasi secara substansional pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Beberapa Fenomena tentang Partisipasi Masyarakat dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dikutip dari kompas.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kasus ini melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa. Menanggapi hal itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Jangan sampai anggaran dana desa itu hanya dikerjakan sekelompok kecil orang. Bagaimanapun partisipasi masyarakat harus bisa optimal, masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa.

Fenomena Selanjutnya dikemukakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikutip dari kompas.com. sekitar 87 laporan dugaan korupsi terkait dana desa yang masuk ke KPK ditindaklanjuti, jumlah tersebut merupakan

bagian dari total 363 laporan dugaan penyimpanan dana desa yang masuk dari laporan masyarakat, Febri mengatakan KPK berharap partisipasi masyarakat lebih luas terkait pemantauan dana desa di masing-masing lokasi mereka.

Fenomena Selanjutnya dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dikutip dari kompas.com. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa, pengawasan perlu dilakukan, sebab Eko menyadari penyaluran dana desa rentan diselewengkan. Eko mengatakan bahwa dirinya meminta bantuan juga dari pemerintahan dalam negeri dalam mengawal dana desa supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam mengawasi penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Fenomena Selanjutnya dikemukakan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dikutip dari kompas.com. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, cukup banyak pelanggaran yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa, setidaknya ada 214 kasus berkaitan dengan penyelewengan dana desa yang ditangani Polri dalam lima tahun terakhir. Selain menangani kasus dana desa Kapolri juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menganggarkan penggunaan dana desa untuk program yang dibutuhkan.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas terlihat bahwa banyak terjadinya penyelewengan dan juga korupsi dana desa karena kurangnya

partisipasi masyarakat. Di sinilah partisipasi masyarakat berperan sangat penting dalam pengelolaan juga pengawasan dana desa. sehingga tidak terjadi penyelewengan dan juga korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten ogan komering ilir, provinsi sumatera selatan, luas wilayah kecamatan jejawi 21.898 Ha dan kecamatan jejawi meliputi 19 desa. Adapun penelitian ini dilakukan pada 3 desa di kecamatan jejawi yakni desa lingkis, muara batun, dan tanjung aur.

Tabel I.1
Profil Desa Tahun 2017
Desa Lingkis Desa Muara Batun dan Desa Tanjung Aur

NO	Keterangan	Lingkis	Muara Batun	Tanjung Aur
1	Jumlah Warga Desa	4.373	3.785	1.643
2	Jenis Kelamin:			
	Laki-laki	2.289	1.920	832
	Perempuan	2.084	1.865	811
3	Pendidikan Terakhir:			
	Tidak sekolah	456	442	226
	SD	358	398	248
	SMP	547	469	145
	SMA	213	184	86
	Kuliah	69	45	26

Sumber: peneliti, 2018

Desa lingkis memiliki kisaran luas wilayah 1.860 Ha dengan jumlah penduduk kisaran 4.373 jiwa, desa muara batun memiliki kisaran luas wilayah 1.645 Ha dengan jumlah penduduk 3.785 jiwa dan desa tanjung aur memiliki kisaran luas wilayah 832 Ha dengan kisaran jumlah penduduk 1.643 jiwa.

Tabel I.2
Alokasi Dana Desa TA 2017
Pada 3 Desa Di Kecamatan Jejawi

NO	DESA	ALOKASI DANA DESA	REALISASI
1	Lingkis	530.437.750	528.437.750
2	Muara Batun	509.237.750	483.437.750
3	Tanjung Aur	492.937.750	485.220.000
JUMLAH		1.532.613.250	1.497.095.500

Sumber: peneliti, 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa pemberian ADD tahun 2017 cukup besar pada setiap desanya, yaitu pada desa lingkis Rp 530.437.750, pada desa muara batun Rp 509.437.750 dan pada desa tanjung aur Rp 492.937.750 maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan juga pengawasan langsung terhadap ADD agar tidak terjadi penyelewengan dan juga tidak terjadinya penyalahgunaan. ADD tahun anggaran 2017 pada desa lingkis, muara batun dan tanjung aur diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyeleggaraan pemerintah desa. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan

pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Tahap perencanaan pembangunan merupakan awal dari pengelolaan ADD, pada tahapan ini partisipasi masyarakat berupa kehadiran masyarakat pada rapat musyawarah desa. Tujuan diadakannya musyawarah melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu memberi ruang pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan juga usulan mengenai apa saja yang dibutuhkan masyarakat supaya ADD dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan pada desa lingkis, muara batun dan tanjung aur dapat dilihat pada tabel I.2 dibawah ini.

Tabel I.3
Daftar Kehadiran Peserta Rapat Musyawarah Desa
Perencanaan Pembangunan tahun 2017

NO	Unsur Peserta	Lingkis	Muara Batun	Tanjung Aur
1.	Ketua RT	8 orang	7 orang	5 orang
2.	Ketua RW	4 orang	4 orang	2 orang
3.	BPD	2 orang	2 orang	2 orang
4.	Tokoh Masyarakat	31 orang	7 orang	22 orang
5.	Unsur kecamatan	2 orang	2 orang	2 orang
6.	Polsek	1 orang	2 orang	2 orang
7.	Puskesmas	1 orang	2 orang	2 orang
	JUMLAH	49 orang	26 orang	37 orang

Sumber: peneliti , 2018

Berdasarkan tabel I.2 menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat pada desa lingkis, desa muara batun dan desa tanjung aur sangat rendah yakni pada desa lingkis 31 orang, desa muara batun 7 orang, desa tanjung aur 22 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat

kesadaran masyarakat sangat rendah. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti, kurangnya partisipasi masyarakat pada desa lingkis, desa muara batun dan desa tanjung aur dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan peran penting mereka dalam pengelolaan ADD sehingga banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada desa lingkis, desa muara batun dan desa tanjung aur serta masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dan memahami apa itu ADD.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh besar terhadap pembangunan dan program di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan baik maka program-program dan pembangunan desa akan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 3 Desa Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada 3 desa di kecamatan jejawi kabupaten OKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada 3 desa di kecamatan jejawi kabupaten OKI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi 3 Desa di Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa

(ADD) sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ega Sulistya ningrum dan suharno (2017) *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*, jurnal pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Diakses September 2018.
- Eko Putro Sandjojo (2017) Mendes Ingin Masyarakat Kawal Dana Desa karena Rentan Penyelewengan. Diakses September 2018.<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/18/12570181/mendes.ingin.masyarakat.kawal.dana.desa.karena.rentan.penyelewengan>
- Febri Diansyah (2017) KPK Telusuri 87 Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Dari Masyarakat. Diakses September 2018.<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/28/kpk-telusuri-87-laporan-dugaan-korupsi-dana-desa-dari-masyarakat>
- Hendra (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Penerbitalumni.com
- Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (2014) *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 19
- Pol Tito Karnavian (2017) Sejak 2012, Polisi Tangani 214 Kasus Dana Desa Senilai Rp 46 Miliar". Diakses September 2018.<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/10411941/sejak-2012-polisi-tangani-214-kasus-dana-desa-senilai-rp-46-miliar>
- Ricky Wirawan, Mardiyono, dkk.(2015) *Partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah*, jurnal ilmu social dan ilmu politik. Vol 4.No.2 (2015).Diakses September 2018.
- Solekhan (2015). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Setara Press.
- Sugiono. (2016) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*, Alfabeta; Bandung

Suwandi (2015) *Partispasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di kantor desa suka damai kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara*, ejournal administrasi negara. Diakses September 2018.

Tjahjo Kumolo (2017) Mendagri Minta Masyarakat Ikut Awasi Dana Desa agar TakDikorupsi .Diakses September 2018.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/18581671/mendagri-minta-masyarakat-ikut-awasi-dana-desa-agar-tak-dikorupsi>

Uma Sekaran (2011) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat

Undang-Undang (UU) Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

V.Wiratna (2015) *AkuntansiDesa*. Pustaka Baru press: Yogyakarta

V.Wiratna (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Pustaka Baru press: Yogyakarta